

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksana negara, pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik dan memadai dari pemerintah. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi masa. Organisasi sektor publik adalah badan yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan urusan negara sesuai dengan konstitusi negara. (Mahmudi, 2016: 2). Organisasi sektor publik memiliki perhatian utama terhadap pelayanan publik serta upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh sektor publik memegang peran penting dalam perekonomian negara secara keseluruhan.

Tingginya kesadaran masyarakat serta adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan administrasi publik membuat kinerja pemerintah semakin menjadi sorotan (Hasthoro, 2016: 55). Agenda reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah saat ini memiliki fokus pada perbaikan sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan. Sebagai bagian dari penyelenggaraan negara, organisasi sektor publik juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memperbaiki kinerja organisasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik

(Bastian, 2006: 4). Saat ini masyarakat semakin kritis dan mempertanyakan manfaat yang mereka dapatkan dari pelayanan instansi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintah. Tuntutan tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 23 ayat (2) tentang pemerintah daerah, yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Pemerintahan yang baik akan dapat tercapai apabila para aparat pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Halim, 2012: 20). Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik merujuk pada pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara teratur. (Elsye et al, 2016: 48). Akuntabilitas tidak hanya sebatas kemampuan lembaga sektor publik dalam mengungkapkan penggunaan uang publik, tetapi juga mencakup kemampuan memberikan jaminan atas penggunaan sumber daya publik secara efisien dan efektif melalui praktik manajemen publik yang baik, termasuk alokasi sumber daya yang tepat. Selain itu, pemerintah juga harus mampu memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Kinerja pemerintahan dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Menurut Tsauri (2014: 4), kinerja dapat diartikan sebagai sebuah hasil atau *output* yang diperoleh dari proses tertentu yang dilakukan oleh semua komponen organisasi dengan menggunakan sumber daya tertentu (*input*). Dengan kata lain, kinerja merupakan keluaran dari seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penilaian kinerja haruslah memenuhi kriteria efisiensi, efektifitas, keadilan serta daya tanggap. Penilaian kualitas dan profesionalisme instansi pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *value for money*. Kinerja pemerintah tidak bisa dinilai hanya dari hasil *output* yang dihasilkan, tetapi harus mencakup *input* dan *outcome* secara terintegrasi.

Pendekatan *value for money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik didasarkan pada tiga elemen penting, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009: 5). *Value for money* adalah suatu konsep dalam organisasi sektor publik yang memperhatikan sejauh mana penggunaan anggaran dan sumber daya dapat memberikan nilai yang diharapkan dengan biaya yang wajar. Dalam konsep ini, terdapat indikator yang dapat memberikan informasi apakah pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik sudah efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.

- a. Dalam konteks *value for money*, ekonomis mengacu pada kemampuan organisasi sektor publik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meminimalisir *input resources* dengan cara menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan yang diperlukan.

- b. Konsep efisiensi dalam organisasi sektor publik merupakan perbandingan antara hasil (*output*) dan sumber daya (*input*) yang digunakan, yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi.
- c. Efektivitas merujuk pada seberapa baik suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran sejauh mana hasil program atau kegiatan dapat memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, organisasi sektor publik harus mengetahui tingkat *input*, *output*, dan *outcome*. *Input* merujuk pada sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan, program, atau aktivitas tertentu (Mardiasmo, 2009: 6). Dalam mengukur kinerja *input*, dilakukan penilaian terhadap jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan program atau kegiatan, seperti anggaran, tenaga kerja, peralatan, bahan baku, dan lainnya. Analisis distribusi sumber daya digunakan untuk mengevaluasi apakah alokasi sumber daya sudah sesuai dengan rencana dan kebutuhan. Sedangkan *output* merupakan keluaran atau hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas, program, dan kebijakan. *Output* dapat diukur dengan melihat hasil dari implementasi program atau aktivitas. Dengan membandingkan hasilnya, dapat dianalisis apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana. Indikator *output* digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kemajuan suatu sasaran kegiatan yang telah didefinisikan dengan jelas dan terukur.

Oleh karena itu, indikator *output* harus disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi. Berbeda dengan *output*, *outcome* dapat diartikan sebagai dampak positif atau negatif yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap masyarakat atau sasaran yang dituju. *Outcome* memiliki nilai yang lebih dari *output*, karena *output* hanya mengukur hasil yang dikeluarkan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar. Indikator *outcome* harus mencerminkan efek jangka panjang yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan dan harus diukur secara teratur untuk mengevaluasi kesuksesannya.

Pemerintah daerah harus bertindak sebagai penyelenggara desentralisasi di daerah dengan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk merealisasikannya, diperlukan berbagai aspek yang memadai bagi pengembangan di dunia usaha. Salah satu sarana perekonomian yang paling banyak ditemui di seluruh pelosok Indonesia adalah perdagangan.

Kota Padang merupakan salah satu wilayah otonomi yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan salah satu daerah yang memiliki cukup banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Kota Padang memiliki Pelabuhan Teluk Bayur sehingga menjadikan Kota Padang sebagai jalur yang sangat strategis dalam jalur perdagangan. Hal tersebut sesuai dengan visi Kota Padang yakni “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing.” Mendukung Visi Kota Padang yang akan

diwujudkan melalui beberapa misi, khususnya misi 2 yaitu “Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Sumatera Barat”, maka aspek perdagangan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Perdagangan di Kota Padang mengalami peningkatan sejalan dengan diperbaikinya dan dikembangkannya pasar-pasar yang telah ada. Untuk sarana pasar yang disediakan kepada masyarakat, pemerintah Kota Padang menyediakan pasar rakyat sebanyak 16 buah dan dikelola langsung oleh pemerintah Kota Padang yang diberi wewenang kepada Dinas Perdagangan dalam penertiban pasar yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pada masyarakat dan pengguna pasar.

Dinas Perdagangan Kota Padang merupakan salah satu organisasi sektor publik yang mana dalam salah satu programnya yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat antara lain dalam bidang perdagangan. Program-program dibuat sesuai dengan visi dan misinya. Rumusan visi Dinas Perdagangan Kota Padang yakni “Terwujudnya Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan di Sumatera Barat yang berdaya saing, tertib ukur, aman, nyaman serta bernuansa wisata”. Dalam pelaksanaan programnya visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi antara lain meningkatkan pembangunan dan revitalisasi sarana perdagangan, mewujudkan penataan kawasan perdagangan secara fisik dan kewenangan, meningkatkan peranan pihak swasta dalam pengembangan prasarana perdagangan, dan mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan PAD.

Pada awal tahun 2020 triwulan pertama terjadi pandemi *covid-19* di Indonesia termasuk Kota Padang, Sumatera Barat. Pelemahan perekonomian akibat virus corona membuat aktifitas sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, serta pendapatan

daerah berkurang. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya gangguan aktifitas ekonomi yang mana salah satunya adalah berdampak terhadap penurunan kinerja. Banyak masyarakat mengeluh karena adanya pandemi ini, beberapa keluhan masyarakat yang dinilai berkaitan dengan aspek perdagangan adalah naiknya beberapa harga bahan kebutuhan pokok, rendahnya daya beli masyarakat, serta banyak UKM yang gulung tikar. Berdasarkan tujuan Dinas Perdagangan Kota Padang yang memberikan pelayanan di bidang perekonomian, dan munculnya beberapa permasalahan dan keluhan, dapat diidentifikasi bahwa pelayanan dan program yang diberikan Dinas Perdagangan perlu perhatian khusus untuk masyarakat kota Padang, terkhusus bagi para pedagang dan pelaku ekonomi.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunannya, Dinas Perdagangan sebagai unit kerja pemerintah dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggaraan negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dengan melakukan pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kota Padang.

Dengan memperhatikan kinerja instansi pemerintah yang kian menjadi sorotan dan juga permasalahan yang ada, maka penulis bermaksud untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis kinerja Dinas Perdagangan Kota Padang dengan menggunakan pendekatan *value for money*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian

yang berjudul “Analisis *Value for Money* dalam Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan Kota Padang (Tahun 2018 sampai dengan 2021).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana kinerja Dinas Perdagangan Kota Padang jika diukur dengan indikator *input* dan *output*?
2. Apakah kinerja Dinas Perdagangan Kota Padang sudah memenuhi standar ekonomis, efisiensi, dan efektivitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

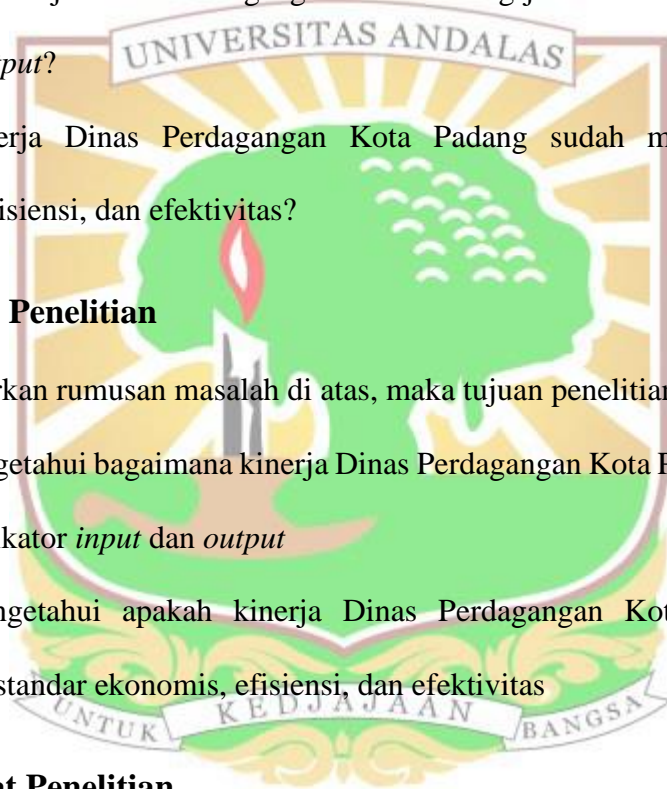
1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Perdagangan Kota Padang jika diukur dengan indikator *input* dan *output*
2. Untuk mengetahui apakah kinerja Dinas Perdagangan Kota Padang sudah memenuhi standar ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini berguna bagi penulis dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari khususnya akuntansi sektor publik serta menambah pengetahuan



penulis mengenai pengukuran kinerja pemerintah jika diukur dengan *value for money*.

2. Bagi Dinas Perdagangan Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *feedback* serta tambahan referensi dalam mengukur kinerja kepada Dinas Perdagangan Kota Padang guna melaksanakan program secara ekonomis, efisien, dan efektif di masa yang akan datang, serta memberikan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan Kota Padang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menganalisis masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan peneliti.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang mencakup metode penelitian, jenis penelitian, variable penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan observasi, dan analisis dokumen.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak terkait.

